

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu negara dengan tingkat ekonomi dan politik yang cukup stabil di Eropa Tengah, perkembangan Polandia tersebut tentunya tidak lepas dari aktor pendorong, terutama Uni Eropa. Keanggotaan Polandia di Uni Eropa memberikan keuntungan bagi pembangunan Polandia, tahun 2004 Uni Eropa menyediakan anggaran dana untuk Polandia sebesar 2,47 miliar EUR dan meningkat menjadi 17,12 miliar EUR pada tahun 2014. Polandia juga menerima dana pembangunan sebesar 56 miliar EUR tahun 2007 – 2013 untuk pembangunan jalan raya, sistem saluran air dan fasilitas umum Polandia merupakan negara penerima terbesar kedua dana Uni Eropa untuk anggaran dana kereta api sekitar PLN 20 miliar di bawah program Infrastruktur dan Lingkungan Uni Eropa. Beberapa keuntungan lainnya yang diperoleh Polandia adalah ketika Polandia melaksanakan lebih dari 177.800 proyek senilai PLN 558,2 miliar, yang mana sebesar PLN 311,2 Miliar dibiayai bersama oleh Uni Eropa. Saat ini Polandia unggul dalam proyek jalan daripada Portugal atau Belanda (Stanislawski, 2014).

Polandia juga memudahkan akses ekspornya ke negara-negara Uni Eropa sehingga pasar Uni Eropa menyumbang sekitar 75% dari total ekspor Polandia dan menarik FDI di Polandia karena meningkatkan daya tarik negara, menjadikannya lebih kredibel bagi investor dan menjamin kepatuhannya terhadap UE. Tidak hanya dalam aspek ekonomi, namun warga negara Polandia juga diberikan kemudahan akses berpergian dan belajar di seluruh Eropa (Adekoya, 2014). Dalam politik, keanggotaan UE membantu posisi Polandia dalam arena politik internasional, yang mana mengkonsolidasikan keamanan, kedaulatan dan signifikasni Polandia dalam hubungan internasional (Kolodziejczyk, 2016: 25).

Dalam satu tahun menjadi anggota Uni Eropa, Polandia mengalami pertumbuhan sektor pertanian dan produksi pangan dari hanya 20% meningkat menjadi lebih dari 70% hanya dalam kurun waktu beberapa bulan. Polandia juga mendapatkan kepercayaan di kalangan investor asing. Hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah bahwa sebagai hasil dari akses ke Uni Eropa, semakin banyak UKM asing tertarik untuk berinvestasi di Polandia. Ekspor Polandia pada tahun 2005 juga naik sekitar 35% dan impor lebih dari 23% jika dibandingkan tahun 2004 (Anon, n.d: 4-5). Lalu, selama tujuh tahun keanggotaan Uni Eropa di Polandia, ekspor Polandia juga naik dua kali lipat (dari EUR 47,5 miliar pada 2003 menjadi EUR 117,4 miliar pada 2010). Uni Eropa tetap menjadi mitra dagang utama Polandia, menyumbang 78,6% dari ekspor Polandia dan 58,8% dari impor Polandia. Tambahan, 15 pasar ekspor teratas untuk Polandia mencakup 12 negara UE, dan 10 negara UE di 15 pasar impor teratas (Anon, n.d: 6-8).

Berkat keanggotaan Uni Eropa pula, Polandia memperoleh manfaat dari dana kohesi (dana struktural dan Kebijakan Kohesi). Kurun waktu tahun 2004 – 2006, dana ini berjumlah EUR 13,9 miliar, sedangkan pada 2007 – 2013 sekitar EUR 67,3 miliar. Dana kebijakan kohesi dialokasikan untuk proyek-proyek yang mendukung pengembangan infrastruktur transportasi, perlindungan lingkungan, UKM, dan program ketenagakerjaan bagi para pengangguran. Di program ketenagakerjaan ini terdapat Dana Sosial Eropa yang memberi manfaat kepada 700.000 orang yang menganggur di Polandia, 400.000 di antaranya menemukan pekerjaan atau mendirikan bisnis mereka sendiri (Anon, n.d: 5).

Kerjasama dan ketergantungan ekonomi Polandia tidak hanya Uni Eropa saja, namun juga dengan Rusia sebagai salah satu negara yang cukup memiliki pengaruh besar di wilayah Eropa. Sebelum berintegrasi dengan Eropa, Polandia merupakan bagian dari blok komunis dengan kedekatan terhadap Uni Soviet baik dari segi ideologi, politik maupun ekonomi di era Perang Dingin. Hingga pasca runtuhnya blok Uni Soviet hubungan keduanya semakin merenggang, Rusia bukan lagi sebagai kiblat ideologi

politik dan preferensi kebijakan luar negeri Polandia. Perekonomian juga tidak lagi bergantung pada Rusia, terlebih pasca COMECON. Namun seiring berjalannya waktu, dinamika hubungan Polandia – Rusia pun kembali melakukan kerjasama ekonomi. Posisi geografis Polandia yang menjadi penghubung antara Eropa Barat dengan Eropa Timur membuat Polandia menjalin hubungan dagang yang cukup intens dengan Rusia (Zagorski, 2015: 362-363).

Pada tahun 2000 – 2004, Polandia merupakan delapan mitra dagang terbesar Rusia dan perdagangan keduanya mencapai 6,5 miliar US dollar. Hubungan dagang antara Polandia dan Rusia pun terus meningkat, berdasarkan data World Bank (n.d) sejak tahun 2005 – 2008, Rusia merupakan negara ekspor tertinggi kedua dengan total perdagangan pada tahun 2005 yaitu 8,986 miliar US dollar, tahun 2006 berjumlah 12,145 miliar US dollar, tahun 2007 berjumlah 14,353 miliar US dollar dan pada tahun 2008 berjumlah 20,545 miliar US dollar. Bidang kerjasama perdagangan Polandia – Rusia mencakup berbagai aspek yakni bahan bakar, bahan mentah, barang konsumsi, barang setengah jadi, mineral, logam, bahan kimia, barang modal, kayu, mesin dan elektronik, plastik atau karet, transportasi, hewan, tekstil dan pakaian, sayur, batu dan kaca, produk makanan hingga alas kaki. Bahan bakar menjadi produk ekspor tertinggi setiap tahunnya antara kedua negara (World Bank, n.d).

Pada 2010, Polandia dan Rusia pun meratifikasi perjanjian impor gas alam dari Rusia yang berlaku hingga 2022 dengan opsi perpanjangan hingga 2037. Gira (2010) menyatakan bahwa perjanjian tersebut sebenarnya sangat menguntungkan Rusia dan semakin meningkatkan ketergantungan Polandia terhadap gas alam Rusia. Perjanjian tersebut mensyaratkan Polandia untuk memberikan akses eksklusif bagi EuroPolGaz, perusahaan hasil *joint venture* antara Rusia dan Polandia, untuk mengelola jaringan Yamal; memberikan diskon terhadap biaya transit gas Rusia melalui Yamal; serta melarang Polandia untuk mengeksport ulang gas alam yang melalui Yamal tanpa persetujuan Gazprom (Gira, 2010: 4-5). Persyaratan tersebut sekilas memang

memberatkan Polandia. Namun, Polandia memang membutuhkan gas alam Rusia untuk menjamin industri Polandia tetap dapat beroperasi khususnya pada musim dingin.

Kebijakan kerjasama ekonomi Polandia tidak hanya terpaut pada Uni Eropa dan Rusia saja. Meskipun keduanya menjadi mitra yang cukup penting bagi Polandia, hal tersebut tidak membuat Polandia menutup kemungkinan dalam memulai hubungan ekonomi baru dengan negara lain, yaitu Tiongkok. Pada tahun 2000an, negara-negara Eropa Tengah dan Timur (CEE) termasuk Polandia merevisi kebijakan luar negerinya untuk lebih memperhatikan dalam mengembangkan hubungan diplomatiknya dengan negara-negara lainnya, termasuk Tiongkok yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang pesat, terlebih ketika peristiwa gelombang pembesaran Uni Eropa 2004 dan 2007 (Jing, 2014). Sebelum mengisiasi kerjasama 16 + 1, Polandia memulai pendekatannya terhadap Tiongkok pada tahun 2004 pasca bergabung dengan Uni Eropa dan melakukan kunjungan negara menandatangani sejumlah dokumen perjanjian kerjasama, termasuk Polandia memberi izin Tiongkok dalam mendirikan Institut Konfusius dan beberapa perusahaan (Palonka, 2010: 371). Memasuki 2006, Polandia memudahkan akses pasar bagi Tiongkok, yang mana dibuktikan ekspor Tiongkok ke Polandia menduduki posisi kelima. Kemudian, Polandia turut merangkul Tiongkok dalam beberapa proyek pembangunan infrastruktur, pertambangan dan pertahanan.

Memasuki tahun 2008, perusahaan-perusahaan Polandia juga menandatangani kontrak ekspor untuk tembaga dan helikopter ke perusahaan Tiongkok. Pada tahun ini juga PM Polandia dan Donald Tusk dan Wakil PM Polandia Waldemar Pawlak mengunjungi Tiongkok untuk menegakkan kerjasama ekonomi Polandia – Tiongkok dan investasi bersama. Data dari Kedutaan Besar Polandia di Beijing menunjukkan bahwa pertumbuhan omset selama tahun 2006 – 2007 diperkirakan 49% dan Polandia menjadi mitra terbesar Tiongkok dalam perdagangan di Eropa Tengah (Kuo, 2017). Dalam hal ini dapat dilihat bahwa hubungan budaya dan ekonomi antara kedua negara telah berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Polandia dengan giat

memperdalam hubungan ekonominya dengan Tiongkok, salah satu strategi Polandia yaitu “Go China” guna mendorong pengusaha Polandia untuk bekerjasama dan menjelajahi pasar Tiongkok (Kuo, 2017). Pada tahun 2010, Polandia melakukan pendekatan terhadap Tiongkok melalui Shanghai EXPO guna meningkatkan minat dan hubungan yang lebih baik.

Hingga akhirnya pada Desember 2011, Pemerintahan Polandia era Presiden Bronisław Komorowski mulai menginisiasi penandatanganan pernyataan bersama untuk memperluas hubungan bilateral ke tingkat kemitraan strategis bersama Presiden Hu Jintao di Beijing. Bronislaw dalam jumpa pers di Beijing mengatakan:

"Both countries, both governments, have come to the conclusion that it is time to enhance our relations and to achieve a strategic partnership between China and Poland,"

Baik Polandia maupun Tiongkok percaya bahwa memperluas dan memperdalam hubungan Polandia – Tiongkok sejalan dengan keinginan bersama kedua negara dan langkah tersebut berkontribusi untuk menjaga perdamaian dan pembangunan global (Embassy of the People’s Republic of China in the Republic of Poland, 2011). Polandia dan Tiongkok menyatakan ingin menjaga dan memperkuat kontak yang berkelanjutan antara pemimpin masing- masing pihak melalui kunjungan bilateral ataupun kesempatan multilateral. Sehingga kedua negara memutuskan untuk membangun mekanisme dialog strategis di antara para Wakil Menteri Luar Negeri untuk saling bertukar pandangan tentang urusan internasional maupun regional dan meningkatkan kerjasama dari Kementerian Luar Negeri masing- masing pihak (Budeanu, 2018: 6). Pihak Polandia berjanji untuk memberikan dukungan dan kemudahan bagi perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk memasuki pasar Polandia maupun Eropa.

Hingga sampai pada bulan April 2012, saat kunjungan diplomatik Perdana Menteri Tiongkok Wen Jiabao ke Warsawa, sebuah perjanjian ekonomi dan politik baru dibuat, yakni kerjasama “16 +1” bersama negara-negara Eropa Tengah dan Timur (CEE) (Embassy of the People’s Republic of China in the Republic of Poland, 2011).

Peresmian inisiatif kerjasama 16+1 di Warsawa sebagaimana Polandia merupakan negara inisiator sekaligus penyelenggara yang mengadakan pertemuan pemimpin pertama antara Tiongkok dengan negara-negara Eropa Tengah dan Timur (CEE). Dalam pertemuan tersebut membentuk badan eksekutif Dewan Bisnis Tiongkok – CEE dan Sekretariat Mekanisme Kontak Agen Promosi Investasi Tiongkok – CEE yang telah menjadi pusat berbagi informasi untuk kerjasama perdagangan dan investasi multilateral (Tiangping, 2015). Enam belas negara yang tergabung yaitu terdiri dari Polandia, Hungaria, Ceko, Slovakia, Rumania, Slovenia, Bulgaria, Lithuania, Estonia, Latvia, Croatia, Albania, Serbia, Macedonia, Montenegro, Bosnia dan Herzegovina.

Pasca peresmian kerjasama 16+1, Polandia mengalami peningkatan bantuan dari Tiongkok berupa teknologi, investasi, pengurangan tarif pajak, infrastruktur, transportasi, perdagangan hingga ekspor impor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi Polandia. Peluang optimalisasi kerjasama bagi Polandia semakin meningkat seiring dengan perkembangan implementasi OBOR Tiongkok. Bahwa bagi Tiongkok, Polandia merupakan salah satu wilayah strategis dalam pelaksanaan kebijakan OBOR (Tiangping, 2015). Kedekatan hubungan kedua negara dapat dilihat dari banyaknya investasi perusahaan Tiongkok di Polandia dalam beberapa bidang seperti penelitian dan pembangunan, transportasi dengan bertanggung jawab atas pembangunan jalan tol dan jalur kereta api, bidang pertahanan dan militer dengan investasi Huta Stawola Wola. Dapat dilihat berdasarkan Tabel 1.1. bahwa nilai perdagangan Polandia – Tiongkok menguasai 30% aktivitas perdagangan di CEE.

Tabel 1.1 Perdagangan Tiongkok dengan 16 Negara CEE

Country	Total Exports		Total Imports		Total Trade	
	US\$ Mn	% Share	US\$ Mn	% Share	US\$ Mn	% Share
Total	42,191	100.0	14,096	100.0	56,290	100.0
Poland	14,346	34.0	2,748	19.5	17,094	30.4
Czech Republic	8,227	19.5	2,784	19.8	11,011	19.6
Hungary	5,198	12.3	2,873	20.4	8,071	14.3
Slovakia	2,794	6.6	2,237	15.9	5,032	8.9
Romania	3,186	7.6	1,299	9.2	4,486	8.0
Slovenia	2,094	5.0	290	2.1	2,383	4.2
Bulgaria	1,044	2.5	756	5.4	1,800	3.2
Lithuania	1,211	2.9	140	1.0	1,351	2.4
Estonia	954	2.3	235	1.7	1,190	2.1
Latvia	1,023	2.4	144	1.0	1,168	2.1
Croatia	986	2.3	112	0.8	1,098	2.0
Albania	430	1.0	129	0.9	559	1.0
Serbia	416	1.0	134	1.0	550	1.0
Macedonia	86	0.2	137	1.0	223	0.4
Montenegro	134	0.3	24	0.2	159	0.3
Bosnia & Herzegovina	62	0.1	54	0.4	115	0.2

Source: China Customs

Sumber: Pendrakowska, Patrycja, 2017. Belt and Road Initiative and 16+1 Challenges for Poland and CEE.

Berdasarkan data Nouvelle Europe (2017), dalam jangka waktu tahun 2004 hingga 2012 nilai perdagangan bilateral diantara keduanya meningkat secara signifikan, dengan nilai impor Polandia dari Tiongkok 15 miliar PLN menjadi 57 miliar PLN pada tahun 2012. Begitupula dengan nilai ekspor Polandia yang meningkat dari 2 miliar PLN ke Tiongkok pada tahun 2004 menjadi 6 miliar PLN di tahun 2012. Aktivitas perdagangan diantara keduanya kemudian terus mengalami peningkatan walaupun dari segi nilai Tiongkok cenderung mendominasi dibandingkan Polandia. Akan tetapi, pada tahun 2014 – 2015 terjadi kemerosotoan ekspor Tiongkok terhadap negara-negara CEE. Lalu, pada tahun 2017, dalam pertemuan tahunan kerjasama 16 + 1, Polandia mengisyaratkan kekecewaannya terhadap kerjasama tersebut. PM Polandia melihat disamping adanya peluang positif dalam kerjasama tersebut, namun Polandia mengakui bahwa Tiongkok adalah “mitra yang menuntut”. Kemudian tahun 2018, PM Polandia menyatakan kembali ketidakpuasannya terhadap defisit perdagangan Polandia – Tiongkok (Sarek, 2019). Hingga akhirnya Polandia pun memutuskan untuk *disengagement* dengan Tiongkok. Melihat hal tersebut, kemunduran Polandia dalam kerjasama 16+ 1 menimbulkan pertanyaan tersendiri bagi penulis, bagaimana pandangan Polandia sebelumnya terhadap Tiongkok sehingga menjadi negara inisiasi kerjasama 16+1

dengan Eropa Tengah dan Timur sebelum akhirnya memutuskan untuk melepas kerjasama tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa Polandia mendekati diri ke Tiongkok melalui inisiasi kerjasama 16+1 padahal selama ini Polandia banyak diuntungkan melalui kerjasamanya dengan Uni Eropa dan Rusia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari tahu apa alasan Polandia terhadap Tiongkok sehingga menginisiasi kerjasama 16 + 1 bersama Eropa Tengah dan Timur. Polandia yang selama ini telah diuntungkan dengan Uni Eropa menjadi daya tarik sendiri mengapa kini justru Polandia berpandangan skeptis terhadap kinerja Uni Eropa. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan alasan-alasan apa saja yang menyebabkan Polandia berpandangan skeptis terhadap Uni Eropa dan bagaimana Rusia dikatakan sebagai potensi ancaman di kawasan Eropa Tengah dan Timur sehingga Polandia cenderung mendekati diri ke Tiongkok.

1.4 Tinjauan Pustaka

Berkaitan dengan penelitian mengenai kepentingan Polandia sebagaimana salah satu negara menonjol di kawasan CEE yang menyepakati kerjasama 16+1 dengan Tiongkok, setidaknya terdapat beberapa tulisan sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Pertama, tulisan dari Łukasz Wenerski dan Michal Kacewicz (2017) yang menjelaskan mengenai sejarah hubungan antara Polandia dengan Rusia setelah Perang Dunia, yang mana Polandia berpihak pada Rusia dan rezim komunis diterapkan di

Polandia hampir setengah abad hingga akhirnya rezim ini dilengserkan pada tahun 1989 di Polandia. Lebih lanjut, dalam tulisannya memaparkan bagaimana perubahan kebijakan luar negeri Polandia pasca runtuhnya pengaruh rezim komunisme, yaitu Polandia berupaya untuk integrasi ke Eropa melalui UE dan NATO. Perubahan kebijakan tersebut tentunya menyebabkan ketegangan antara Polandia dengan Rusia, terlebih ketika Polandia pada awal tahun 2000-an sangat pro-Amerika Serikat. Selanjutnya, tulisan ini memaparkan bagaimana hubungan diplomatik kedua negara setelah aneksasi Krimea, sebagaimana Polandia yang terus mendesak akan pemberian sanksi terhadap Rusia (Wenerski dan Kacewicz, 2017: 13-14).

Tulisan kedua adalah tulisan Rafał Bajczuk (2011) yang pada intinya membahas mengenai tujuan utama kebijakan luar negeri Polandia sejak runtuhnya tirai besi yaitu melakukan integrasi ke Eropa melalui keanggotaannya di Uni Eropa. Keanggotaan Uni Eropa adalah sarana untuk meningkatkan posisi Polandia dalam politik internasional dan untuk mempromosikan tujuan politiknya. Minat Polandia terhadap keamanan dan kebijakan luar negeri meliputi promosi demokrasi di negara-negara di sekitar Uni Eropa dan mempertahankan hubungannya dengan Rusia (Bajczuk, 2011: 3-4).

Tulisan ketiga adalah tulisan Adriana Skorupska dan Justyna Szczudlik- Tatar (2014) yang membahas mengenai hubungan kerjasama antara Polandia dengan Tiongkok. Sebagaimana Tiongkok merupakan salah satu negara prioritas kebijakan luar negeri Polandia di kawasan Asia. Saat ini, hubungan Polandia – Tiongkok setidaknya terdapat tiga tingkatan, yaitu pertama adalah bilateral yang mencakup pemerintah pusat seperti dialog strategis, KTT perdana menteri dan tingkat lokal seperti Forum Regional Polandia – Tiongkok sebagai wadah diskusi antara pemerintah daerah, pengusaha dan lain-lain. Tingkat kedua, sub-regional seperti kerjasama 16+1 bersama negara-negara Eropa Tengah dan Timur. Terakhir, tingkat UE seperti misalnya KTT Uni Eropa – Tiongkok. Menurut analisis Skorupska dan Szczudlik, tujuan utama Polandia bekerjasama dengan Tiongkok adalah bidang ekonomi untuk memperluas ekspor

Polandia ke Tiongkok, menarik minat investasi Tiongkok dan meningkatkan FDI Polandia di Tiongkok (Skorupska dan Szczudulik, 2014: 1-3).

Tulisan lain sebagai tinjauan dalam penelitian ini adalah mengenai hubungan antara Polandia dan Tiongkok mengenai dua aspek, yaitu Belt and Road Initiative (BRI) dan 16+1. Diungkapkan oleh Patrycja Pendrakowska (2017) bahwa pengembangan infrastruktur dan logistik merupakan proyek investasi utama untuk kerjasama 16+1 dan juga untuk BRI. Hal ini dapat dilihat dari dibangunnya pusat logistik maupun rute transportasi di Polandia. Polandia sebagai negara 'terbesar' dalam kawasan tersebut berpotensi memainkan peran sebagai pemimpin regional dalam negosiasi dengan Tiongkok. Tulisan ini juga membahas mengenai tantangan dari hubungan Polandia dan Tiongkok, yang mana terdapat perbedaan kepentingan ketika Polandia minat akan investasi *greenfield*, namun Tiongkok lebih tertarik pada akuisisi dan akses ke pasar. Masalah selanjutnya adalah defisit perdagangan yang mana Polandia serta negara-negara CEE lainnya membutuhkan akses yang lebih baik ke pasar Tiongkok guna menyeimbangkan defisit perdagangan yang tumbuh. Namun perusahaan Polandia mengeluh akan tingginya hambatan memasuki pasar Tiongkok (Pendrakowska, 2017: 1-4).

Dalam penelitian lain hanya mendeskripsikan bagaimana hubungan Polandia dengan Tiongkok, Rusia dan UE secara umum. Selain itu, tulisan-tulisan tersebut hanya menjelaskan bagaimana keuntungan ekonomi yang diperoleh dari Polandia melalui kerjasama 16+1. Berbeda dengan penelitian sebelumnya di atas, penelitian ini berfokus dalam menganalisa alasan Polandia menginisiasi kerjasama 16+1 dengan Tiongkok bersama negara-negara Eropa Tengah dan Timur lainnya. Penelitian ini juga mengkaitkan lahirnya kebijakan kerjasama 16+1 Polandia dengan dinamika situasi politik dan ekonomi yang dialami pada masa tersebut (sebelum inisiasi tahun 2012). Terutama berkaitan dengan hubungan Polandia dengan Uni Eropa dan Rusia; semakin

intensifnya hubungan ekonomi Polandia dengan Tiongkok. Serta meningkatnya ekspansi ekonomi Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi global baru.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Analisis Sistem Internasional dalam Kebijakan Luar Negeri

Analisis pada level internasional melihat pengaruh lingkungan internasional yang berkembang sebagai faktor dominan dalam penentuan kebijakan luar negeri suatu negara. Seperti yang diungkapkan oleh Hudson (2014: 2-3) bahwa analisis pada level ini merupakan abstraksi tertinggi dalam menganalisis tentang pola kebijakan antar negara. Dalam memahami alasan penentuan kebijakan suatu negara, analisis sistem internasional melihat secara lebih abstrak mengenai kondisi dan dinamika yang terjadi pada sistem internasional dimana terdapat keseluruhan negara tersebut saling berinteraksi. Kebijakan suatu negara akan diambil berdasarkan pada konteks situasi yang dihadapi. Pemahaman serupa juga diungkapkan Breuning (2007: 156) bahwa memahami dinamika pada sistem merupakan hal penting bagi pembuat keputusan sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan luar negeri yang diterapkan. Pembuat kebijakan dalam hal ini negara akan melihat segala peluang terkait dinamika dan situasi negara-negara lain dalam sistem guna mengamankan kepentingan negaranya.

Secara sederhana berdasarkan teori sistem menurut Hudson (2014: 13) atribut pada sistem akan memberikan dampak dalam kebijakan negara. Atribut dalam hal ini meliputi beberapa hal seperti jumlah aktor, distribusi kekuatan, jumlah negara maju dan blok, mekanisme aliansi, aktor supranasional dan lainnya. Sejalan dengan anggapan tersebut faktor posisi negara dalam sistem menjadi determinan dalam memahami kebijakannya. Bahwa menurut Breuning (2007: 142) terdapat pengklasifikasian negara kedalam tiga kategori yaitu *super power*, *middle power*, dan *small power*. Pengklasifikasian tersebut didapat berdasarkan indikator terkait berupa akumulasi kekuatan suatu negara dibandingkan dengan kekuatan negara lainnya. Setiap negara memiliki kecenderungan kebijakannya masing-masing berdasarkan perhitungan rasional mengenai kepentingan

dan kekuatan potensialnya terhadap negara lain. Negara *super power* dapat diidentifikasi dengan memiliki kekuatan politik, ekonomi dan militer untuk memberikan pengaruh pada skala global. Selain itu, negara-negara *super power* biasanya telah diakui sebagai pemain penting di ‘panggung’ dunia dengan status mereka sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB (Breuning, 2007: 142-144).

Selanjutnya, negara *middle power* cenderung memposisikan negaranya dalam kepemimpinan sebagai ‘norm entrepreneur’ dalam upaya mengurangi ketidaksetaraan global. Hal ini akhirnya mendorong negara-negara yang terlibat berkomitmen dalam kerjasama ataupun organisasi internasional yang mendukung peningkatan distribusi sumber daya ke negara-negara miskin lainnya. Terdapat tiga karakteristik perilaku dari negara *middle power*, pertama *middle power* bertindak sebagai katalis dengan menginisiasi tujuan kebijakan luar negeri tertentu, sebagai fasilitator dengan mencari negara-negara lainnya yang memiliki pikiran dan tujuan yang sama untuk membentuk koalisi dan asosiasi, peran manajer dengan memprakasi pembentukan organisasi, institusi dan asosiasi (Breuning, 2007: 150-151). *Middle power* ini juga didefinisikan sebagai negara yang memiliki sumber daya untuk mengerahkan pengaruh di wilayahnya sendiri di dunia.

Opsi kebijakan luar negeri dari negara *middle power* adalah dengan kerjasama, memposisikan negaranya dalam kepemimpinan sebagai ‘norm entrepreneur’ dalam upaya mengurangi ketidaksetaraan global. Menurut Jordaan (2003: 4) kebijakan luar negeri *middle power* sering berfokus pada pengurangan konflik dalam sistem dunia dengan melibatkan negara-negara lain yang berpikiran sama (dalam hal masalah yang dihadapi) dalam upaya untuk mencapai kompromi yang dapat dilakukan, biasanya melalui saluran multilateral dan insitusi. Kepentingan kebijakan *middle power* juga terdiri atas ketertarikan pada stabilitas global, kontrolabilitas dan prediktabilitas, strategi konservatif yang memiliki efek melestarikan *status quo*, memperkuat kesetaraan yang ada dalam kekuasaan dan kekayaan untuk keuntungan relative mereka. *Middle power*

cenderung berkontribusi melalui OI yang pragmatis (Jordaan, 2003: 2-4). Breuning (2007: 150) menjelaskan juga bahwa *middle power* dikarenakan keterbatasan kekuatan, memiliki kecenderungan mendekat terhadap negara besar.

Terakhir, negara dengan *small power* identik dengan negara kecil dengan lembaga pemerintahan yang tidak efektif. Dalam hal ini, negara tersebut mirip dengan negara gagal, yang didefinisikan oleh kegagalan lembaga-lembaga pemerintah untuk mengendalikan wilayah negara. *Small power* memiliki kapasitas yang agak terbatas untuk memberikan pengaruh pada negara-negara lain. Pemimpin negara *super power* secara sukarela menyelaraskan kebijakan eksternal mereka dengan kebijakan negara yang lebih kuat dan lebih besar yang memiliki kapasitas untuk memberikan pengaruh terhadap mereka. *Small power* tidak memiliki sumber daya untuk terlibat dalam upaya pembuatan kebijakan luar negeri (Breuning, 2007: 152- 153). Dengan melihat tiga kategori *power* tersebut, penulis menyimpulkan bahwa status Polandia ialah sebagai negara *middle power* sehingga pilihan kebijakannya adalah dengan merapat ke Tiongkok. Sedangkan Rusia dan Tiongkok dapat dikatakan sebagai *super power* dan Uni Eropa sebagai entitas yang mewakili *super power* Eropa seperti Jerman dan Prancis.

Kebijakan luar negeri juga akan mengalami perubahan seiring dengan dinamika pada sistem. Menurut Hudson (2014) analisis pada level ini juga mengenal konsep transisi sistem, bahwa realitas sistem yang terus berubah akan diikuti pula oleh dinamika kebijakan luar negeri negara-negara di dalamnya. Salah satu pemahaman dalam konsep ini adalah teori siklus Modelski (dalam Hudson, 2014: 8-10) bahwa sistem internasional mengalami transisi melalui siklus panjang. Siklus ini bermula pada fase lahirnya negara hegemon yang mengakibatkan adanya sistem yang unipolar. Status unipolar ini perlahan semakin kuat hingga perlahan mengalami delegitimasi sejalan dengan meningkatnya pengaruh negara rival dalam sistem. Situasi pergeseran kekuatan ini kemudian menghasilkan transisi dari unipolar menuju sistem multipolar sebelum terjadinya dekonsentrasi kekuatan terhadap negara lain (Hudson, 2014: 12-14). Adanya transisi

sistem penting untuk melihat dinamika yang terjadi dalam suatu kawasan, akan tetapi dalam skripsi ini transisi sistem tidak sepenuhnya relevan. Hal ini dikarenakan skripsi ini cenderung pada adanya dinamika transisi pengaruh dalam lingkup yang lebih khusus untuk menganalisis dinamika yang terjadi dalam kawasan Eropa Tengah dan Timur. Transisi pengaruh disini guna menggambarkan bagaimana kekuatan dua aktor utama Tiongkok dan Uni Eropa, di kawasan Eropa Tengah dan Timur, khususnya Polandia.

Menginjak tahun 2000an, terjadi transisi sistem Tiongkok sebagai *global economic power*, terlebih ketika tahun 2001 Tiongkok bergabung ke dalam WTO sehingga Tiongkok mulai agresif dan semakin intensif. Kemudian, krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008 mengakibatkan keterpurukan ekonomi di Eropa, termasuk Polandia. Adanya transisi sistem tersebut akhirnya mendorong Polandia mengubah kebijakan luar negerinya untuk lebih melihat pasar lain di luar Uni Eropa sebagai upaya memulihkan kondisi perekonomian negaranya (Tiangping, 2015). Selanjutnya, pergeseran sistem Tiongkok sebagai *global economic power* telah mempengaruhi Polandia sehingga melakukan inisiasi kerjasama 16 + 1 bersama Eropa Tengah dan Timur dengan Tiongkok. Dominasi Tiongkok dalam perekonomian global semakin intensif ketika diluncurkannya kebijakan BRI atau OBOR yang bertujuan dalam pengembangan ekonomi di bidang infrastruktur, perdagangan dan investasi di tiga benua Asia, Eropa dan Afrika. Adanya peningkatan pengaruh Tiongkok di Eropa Tengah dan Timur tersebut membuktikan bahwa adanya delegitimasi Uni Eropa (Tiangping, 2015).

Uni Eropa mengalami delegitimasi disebabkan oleh beberapa hal, seperti misalnya munculnya pandangan skeptisme baik dari Polandia maupun negara-negara anggotanya terhadap Uni Eropa. Hal ini dilatarbelakangi oleh Polandia yang melihat adanya ancaman di perbatasan negaranya karena dibanjiri oleh datangnya imigran dari Selatan dan UE tidak ada upaya untuk mengakomodasi hal tersebut. Permasalahan ini menyebabkan Polandia berseteru dengan Brussels mengenai pengungsi dan aturan hukum di dalam negeri yang kemudian memicu pembicaraan tentang “Polexit”

(Kaminski, 2018). Masalah selanjutnya yaitu adanya pengurangan dana yang diusulkan dalam proposal UE oleh Komisi Eropa di Kebijakan Kohesi, yang mana kebijakan tersebut merupakan ‘alat’ utama investasi UE yang menyumbang sepertiga dari anggaran UE. Adanya pernyataan untuk memotong dana setelah tahun 2020 dari 34% menjadi 29% tersebut berpotensi menurunkan satu-satunya kebijakan UE yang menjadi nilai tambah kawasan Eropa. Mengingat sebagai salah satu dampak finansial Brexit, Komisi UE menekankan bahwa proposal anggaran kini bisa tidak memenuhi harapan maupun kebutuhan UE (European Committee of the Regions, 2018).

1.5.2 Respon terhadap Negara Dominan: *Balance of Threat*

Teori Balance of Threat ini sebagai bentuk modifikasi dari realisme serta neorealisme oleh Kenneth Waltz dengan memisahkan kekuatan dari ancaman. Teori Balance of Threat menurut Walt adalah tentang kedekatan geografis antara negara-negara. “Negara-negara yang berada di sekitarnya berpotensi menimbulkan ancaman yang lebih besar daripada negara-negara yang jauh” ini merupakan salah satu dasar penilaian ancaman dari yang terdekat. Walt menyatakan bahwa negara-negara lemah cenderung sangat sensitif terhadap kekuatan terdekat, sebagai contoh pada saat kekaisaran Ottoman sangat mengkhawatirkan Rusia, negara tetangga yang kuat dan mengancam. Rusia di antara yang lainnya terbukti menjadi ancaman paling dekat terhadap kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas teritorialnya (Dagi, 2018:144-145).

Balance of Threat menunjukkan bahwa negara membentuk aliansi untuk mencegah kekuatan yang lebih kuat dari mendominasi mereka dan untuk melindungi diri mereka sendiri dari negara atau koalisi yang sumber daya superiornya menjadi ancaman bagi negara mereka. Walt mengidentifikasi empat kriteria yang digunakan negara untuk mengevaluasi ancaman yang ditimbulkan oleh negara lain yaitu kekuatan agregatnya (ukuran, populasi, dan kemampuan ekonomi), kedekatan geografisnya, kemampuan ofensifnya, dan niat ofensifnya (Walt, 1985, dalam Watson, 2000: 30-31).

Teori Balance of Threat yaitu berbicara tentang bagaimana perilaku aliansi negara ditentukan oleh ancaman yang mereka rasakan dari negara lain. Walt berpendapat bahwa negara-negara umumnya akan menyeimbangkan dengan bersekutu melawan ancaman yang dirasakan, meskipun negara-negara yang sangat lemah lebih mungkin untuk ikut-ikutan dengan meningkatnya ancaman untuk melindungi keamanan mereka sendiri. Aliansi paling sering dipandang sebagai respon terhadap ancaman. Saat memasuki aliansi atau bersekutu, negara dapat *balance* dengan (bersekutu dalam oposisi terhadap sumber bahaya utama) atau *bandwagon* (bersekutu dengan negara yang menjadi ancaman utama). Negara akan memilih untuk menyeimbangkan karena dua alasan utama, yakni pertama adalah negara mempertaruhkan kelangsungan hidup mereka sendiri jika mereka gagal membatasi potensi hegemon sebelum menjadi terlalu kuat. Strategi yang aman adalah dengan beraliansi dengan mereka yang kuat dan tidak dapat dengan mudah mendominasi aliansi mereka. Kedua, beraliansi dengan pihak yang lebih rentan meningkatkan pengaruh anggota baru, karena pihak yang lebih lemah membutuhkan bantuan yang lebih besar (Walt, 1985, dalam Watson 2000: 10-11). Dalam hal ini, penulis menyimpulkan bahwa strategi pertama dengan beraliansi dengan pihak kuat dan tidak dengan mudah mendominasi aliansi mereka adalah pilihan Polandia. Hal ini sebagaimana *middle power* yang memiliki strategi konservatif untuk tetap mempertahankan *status quonya*. *Middle power* dalam melihat permasalahan atau tantangan cenderung melalui kerjasama multilateral hingga membentuk aliansi. Hal ini dikenal sebagai strategi lindung nilai untuk meminimalkan risiko. Kerangka teori tersebut digunakan penulis guna membuktikan bahwa kerjasama ini tidak hanya penting bagi perekonomian Polandia, melainkan juga memiliki muatan politik dalam mengatasi *dilemma* ancaman yang dihadapi.

Dalam hal ini, Polandia melihat Rusia sebagai ancaman. Pada tahun 2007, terdapat “kebijakan rekonsiliasi” antara Polandia dengan Rusia yang menghasilkan pembentukan “segitiga Kaliningrad”, yaitu pertemuan antara para menteri luar negeri Polandia, Rusia dan Jerman. Namun sayangnya, pada tahun 2011 kebijakan rekonsiliasi ini tidak

bertahan lama karena ada dua faktor utama pertama yaitu adanya agresi Rusia ke Ukraina dan ketidakpastian antara kedua negara terkait kecelakaan pesawat yang mengakibatkan meninggalnya Presiden Lech Kaczyński dan hampir seratus pejabat tinggi Polandia lainnya di Smolensk pada April 2010. Perubahan kebijakan tersebut akhirnya mempengaruhi berbagai bidang, seperti program ‘Polandia di Rusia’ yang direncanakan untuk tahun 2015 dibatalkan. Selain itu, kerjasama “segitiga Kaliningrad ” juga ditunda dan perdagangan bilateral antara kedua negara terhambat karena sanksi terhadap Rusia (Wenerski dan Kacewicz, 2017: 13).

Pasca Perang Dingin, ketakutan Polandia bergeser menjadi ketakutan akan dominasi ekonomi Rusia, hingga Polandia menetapkan kebijakan memblokir investasi Rusia karena adanya kecurigaan terhadap Rusia yang membeli beberapa saham terkemuka di Warsawa. Contohnya, adanya penolakan Polandia terhadap Rusia Acron pada tahun 2012 untuk membeli saham perusahaan konstruksi dan kimia terbesar di Polandia (Onoszko, 2012). Polandia beranggapan bahwa sejatinya masalah bisnis tidak dapat dipisahkan dari politik. Pada tahun 2010 juga terdapat perjanjian impor gas alam antara Polandia – Rusia, yang mana perjanjian tersebut sangat menguntungkan Rusia dan meningkatkan ketergantungan Polandia terhadap gas alam Rusia (Gira, 2010: 2-3).

Sehingga kerangka pemikiran Balance of Threat ini digunakan peneliti untuk menganalisa persepsi Polandia terhadap negara-negara di kawasan, terutama Rusia. Bahwa hingga saat ini Polandia tetap mempersepsikan Rusia sebagai ancaman di kawasan Eropa. Walaupun Rusia dianggap sebagai ancaman bagi Polandia, disisi lain Polandia masih memiliki ketergantungan salah satu sektor ekonomi terhadap Rusia. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri bagi Polandia, maka dari itu pendekatan Polandia terhadap Tiongkok melalui kerjasama 16+1 berkaitan dengan pertimbangan atas situasi tersebut.

1.6 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut peneliti menarik hipotesis bahwa kepentingan Polandia dalam menginisiasi kerangka kerjasama 16 + 1 bersama dengan negara-negara CEE dipengaruhi oleh situasi di kawasan yang berubah. Situasi tersebut adalah: (1) transisi pengaruh di Eropa Tengah yang dipicu oleh delegitimasi Uni Eropa dan naiknya agresifitas Tiongkok di kawasan melalui BRI; (2) adanya potensi ancaman yang ditunjukkan oleh Russia pada Polandia, terlebih ketika adanya kecurigaan terhadap Rusia yang membeli beberapa saham terkemuka di Warsawa dan perjanjian kenaikan tarif impor gas yang dianggap menguntungkan sepihak hingga insiden kecelakaan pesawat yang menewaskan Presiden Polandia di wilayah Rusia pada tahun 2010.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Definisi dan Operasionalisasi Konsep

1.7.1.1 Transisi Pengaruh

Transisi yaitu ketika terjadi '*disconnection*' suatu negara atau organisasi dari pola lama guna mencari tujuan baru dan kuat. Teori transisi ini dikembangkan oleh Organski, Jacek Kugler beserta kolega lainnya yang mengklaim bahwa sistem internasional biasanya disusun secara hierarkis dengan kekuatan dominan di puncak yang menciptakan dan mempertahankan tatanan internasional. Karena tingkat pertumbuhan yang tidak merata maka kekuatan baru secara teratur akan meningkat (Rauch, 2018: 1-2). Transisi ini tidak hanya menekankan kekuatan relatif saja, tetapi sebagai pengaruh utama pada kerja sama dan konflik internasional.

Sedangkan pengaruh merupakan klaim oleh negara atas kontrol dan diakui oleh negara lain. Instrumen pengaruh dapat mencakup perdagangan dan transfer senjata sebagai elemen kebijakan luar negeri utama yang digunakan oleh para aktor utama. Semakin suatu negara bergantung secara ekonomi terhadap negara lain, maka para elit akan

mempertahankan kepentingannya. Perdagangan memberikan pengaruh dominan negara atas kebijakan luar negeri suatu negara yang bergantung terhadap negara dominan (Imai dan James, 2008: 168). Lingkup pengaruh bukanlah struktur permanen dalam sistem internasional, tetapi dibentuk dan dibentuk kembali dalam interaksi dan wacana di antara lintas negara, dimana kekuatan eksternal tunggal memberikan pengaruh dominan, yang membatasi independensi atau kebebasan bertindak entitas di dalamnya (Hast, 2016: 5-6). Pengaruh ini juga mencakup mengirim bantuan asing guna untuk mendukung terhadap aspirasi politik negara yang lebih kuat dan bantuan ekonomi dapat berfungsi untuk memfasilitasi ikatan bilateral negara. Semakin banyak bantuan asing yang diperluas oleh suatu negara, maka semakin besar kemungkinannya untuk mendukung kepentingan politik negara yang lebih kuat (Imai dan James, 2008: 169-170).

Dalam teori Modelski menjelaskan bahwa sistem internasional mengalami transisi melalui siklus yang bermula pada fase lahirnya negara hegemon yang mengakibatkan adanya sistem yang unipolar. Status unipolar ini perlahan semakin kuat hingga perlahan mengalami delegitimasi sejalan dengan meningkatnya pengaruh negara rival dalam sistem. Situasi erosi kekuatan ini kemudian menghasilkan transisi dari unipolar menuju sistem multipolar sebelum terjadinya dekonsentrasi kekuatan terhadap negara lain (Hudson, 2014: 10). Terjadinya transisi pengaruh ini didorong oleh suatu otoritas yang dominan menciptakan seperangkat aturan dan norma untuk mengatur sistem internasional yang tercermin oleh status quo (Tammen et al, 2011: 32). Dalam penelitian ini, konsep transisi pengaruh ini dipahami sebagai adanya pergeseran kekuatan di Eropa Tengah oleh Tiongkok sebagai kekuatan dominan baru yang muncul.

1.7.1.3. Agresifitas

Definisi agresifitas dilakukan dalam keadaan yang tidak dapat dikendalikan. Teori agresifitas diakui sebagai fakta dasar bahwa semua makhluk hidup lebih tinggi dan terdapat sistem perilaku universal untuk 'menyerang' pihak lain yang sama dalam kondisi yang ditentukan (Kornadt, 1984). Tindakan agresifitas dianggap sebagai

provokatif (Etzioni, 2016: 292). Agresifitas bisa bersifat positif ataupun negatif. Definisi lain mengatakan bahwa sikap tersebut berkaitan dengan pembenaran moral atau legitimasi suatu tindakan. Agresifitas biasanya dipandang sebagai alat adaptif yang diperlukan atau mekanisme darurat dalam menyelesaikan masalah secara intelektual, suatu pihak akan berusaha mengubah keadaan pihak lainnya untuk menggangu lingkungannya, atau bahkan upaya untuk mempertahankan posisi pihaknya meskipun keadaan yang berubah (Kornadt, 1984).

Beberapa penulis mendefinisikan 'agresifitas' secara luas hingga identik dengan 'ketegasan' atau 'pencarian prestasi'. Pihak yang melakukan agresifitas bertindak defensif, melindungi dirinya atau nilai-nilainya. Lauretta Bender (1948, dalam van der Dennen, 1980: 207) mendefinisikan agresifitas sebagai kecenderungan untuk maju atau mendekati suatu objek. Sedangkan Allen (1948, dalam van der Dennen, 1980: 207) menggambarannya sebagai keinginan untuk memastikan dan menguji kemampuan kita untuk menghadapi kekuatan eksternal; yang mungkin melibatkan permusuhan atau tidak. Istilah 'agresifitas' begitu luas sehingga mencakup segala sesuatu, atau disebut 'drive aktivitas'. May (1972, dalam van der Dennen, 1980: 207) menghubungkan agresifitas dengan kekuasaan.

Dalam penelitian ini, agresifitas dipahami sebagai sikap Tiongkok dilihat dari kebijakannya, yang mana mengadopsi kebijakan luar negeri yang jauh lebih pragmatis, mulai memupuk hubungan kerjasama dengan mitra ekonomi. Pada akhir 2004, Tiongkok menjadi pihak 267 perjanjian multilateral dan tahun 2005 Tiongkok menandatangani 370 perjanjian bilateral. Selain itu, tindakan agresifitas dengan membangun aset secara legal, mencari sekutu dan membangun aliansi, menduduki wilayah yang diperebutkan. Kepentingan Tiongkok juga semakin meluas, terlebih ketika adanya BRI dan OBOR. Agresifitas Tiongkok juga ditunjukkan dengan adanya kegiatan pembangunan di Laut China Selatan (Zhimin, t.t: 12-13). Sejalan dengan asumsi realisme tentang *power*, bahwa negara selalu berusaha mencapai kepentingannya

dengan melakukan maksimalisasi power. Hal ini dapat dipahami juga sebagai agresifitas Tiongkok.

1.7.1.4. Delegitimasi

Delegitimasi menggambarkan proses kontestasi yang merusak legitimasi institusi yang ada. Konsep delegitimasi dapat digunakan, misalnya untuk menangkap berbagai strategi yang digunakan oleh suatu organisasi yang menentang prosedur dan kebijakan organisasi tata kelola global (Bexell, 2014). Delegitimasi terjadi karena adanya tantangan utama bagi pemerintahan yaitu perpecahan politik yang muncul sehingga mempertanyakan legitimasi aturan hukum di antara negara-negara (Hooghe, et al, 2018: 1). Tallberg dan Zurn mengatakan jika legitimasi memiliki ruang kepercayaan terhadap suatu institusi, maka delegitimasi berkata sebaliknya (Hooghe, et al, 2018: 4).

Delegitimasi adalah pernyataan publik yang melibatkan evaluasi negatif ataupun mengkritik suatu aktor karena tidak demokratis atau karena mengejar kebijakan yang membuat orang miskin menjadi lebih buruk, hingga prosedur pengambilan keputusan yang tidak adil (Tallberg dan Zurn, 2019: 588). Praktik-praktik delegitimasi dimaksudkan untuk memobilisasi dan memberi sinyal ketidakpuasan. Ini juga mencakup pengalihan rezim dan penciptaan rezim kompetitif oleh negara-negara yang menentang tatanan multilateral yang ada. Ketika aktor tidak memenuhi standar prosedural yang diakui secara luas, ini menciptakan peluang bagi lawan untuk mendelegitimasi aktor tersebut dengan mengacu pada batasan-batasan ini (Tallberg dan Zurn, 2019: 588- 589). Suatu aktor melakukan pendelegitimasi karena merasa kurang puas terhadap suatu rezim yang berkuasa. Konsep delegitimasi terjadi ketika suatu institusi tidak lagi mendapatkan recognition oleh negara-negara yang bersangkutan (Cammarano, 2017: 66-67).

Merujuk pada serangkaian definisi tersebut, dalam penelitian ini menggunakan konsep delegitimasi guna menjelaskan posisi Uni Eropa dalam kawasan Eropa Tengah,

mengingat Polandia mulai giat membuka peluang kerjasamanya terhadap Tiongkok.

1.7.1.5. Potensi Ancaman

Potensi ancaman negara berhubungan dengan adanya tantangan terhadap keamanan nasional. Ancaman terhadap keamanan negara sering dipahami dalam hal potensi dampak destruktifnya terhadap negara, seperti misalnya dalam bentuk krisis dan konflik. Potensi ancaman ini tidak dapat diprediksi dan memiliki efek negatif pada fungsi suatu sistem atau menyebabkan perubahan (berbahaya) yang merugikan dalam struktur dan fungsinya (Glen, 2012: 56). Glen (2012: 56-58) mengklasifikasikan potensi ancaman menjadi dua, yaitu militer dan non-militer. Ancaman militer memiliki karakter konvensional dan ancaman non-militer mencakup ekonomi, politik, budaya, biologis atau epidemiologis, bencana alam hingga sosial pengaruh psikologis.

Dalam penelitian ini, potensi ancaman merujuk pada Rusia terhadap Polandia. Salah satu ancaman penting bagi Polandia adalah ancaman energi karena diversifikasi pasokan energi yang tidak mencukupi, khususnya minyak mentah dan gas alam, merupakan tantangan utama bagi keamanan Polandia. Masalah pasokan energi yang tidak mencukupi akhirnya mendorong terjadinya monopoli energi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Polandia, maupun negara-negara Eropa Tengah dan Timur lainnya (Glen, 2012; 62-63). Selain itu, dari aspek ekonomi, ancaman Rusia juga berasal dari rasa kecurigaan ketika Rusia berupaya mengakuisisi beberapa perusahaan strategis Polandia dan melakukan pembangunan proyek-proyek di kawasan yang cukup mencurigakan (Glen, 2012: 62-63). Peneliti menilai bahwa Rusia akan terus mengejar berbagai tujuan untuk memperluas jangkauannya, menunjukkan kemampuan Rusia untuk membentuk isu- isu global, dan memperkuat legitimasi domestik Putin.

1.7.2. Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini tergolongkan dalam kategori penelitian eksplanatif guna menjawab pertanyaan mengenai mengapa. Penelitian eksplanatif bertujuan menjelaskan fenomena tertentu dengan mencari alasan berdasarkan hubungan sebab akibat mengacu pada teori yang ada untuk menilai fenomena dengan cara baru (Saunders, et al, 2000: 2). Peneliti dalam hal ini berusaha mencari jawaban mengenai alasan dibalik penentuan kebijakan yang ditetapkan oleh suatu negara dalam hal ini Polandia terkait inisiatif kebijakannya dalam memprakarsai kerjasama ekonomi kawasan dengan Tiongkok melalui 16+1.

1.7.3 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dimulai ketika tahun 2000an Polandia mengubah kebijakan luar negerinya dan terjadi perubahan sistem di Eropa Tengah sehingga terbentuknya inisiatif kerjasama 16+1 yang dilakukan secara resmi oleh Polandia pada tahun 2012. Walaupun demikian, peneliti membutuhkan data sebelum tahun tersebut mengingat terdapat sejarah hubungan Polandia dengan Tiongkok dan Uni Eropa, terutama pasca Perang Dingin begitu juga dengan Rusia.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan baik melalui sumber primer maupun sekunder. Sumber Primer diperoleh melalui data yang dirilis dalam situs resmi pemerintah Polandia maupun Tiongkok. Sementara itu disisi lain penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, artikel, arsip pemerintah, dan berita yang berkaitan dengan topik penelitian yang dipublikasikan di Internet.

1.7.5 Teknik Analisis Data

Dalam membuktikan hipotesis dan menjawab rumusan masalah penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif yang merupakan interpretasi dari hasil data yang diperoleh oleh peneliti. Analisis data kualitatif adalah klasifikasi dan interpretasi bahan linguistik atau visual yang kemudian menghasilkan suatu pola dari konsep dan wawasan yang didapatkan (Flick, 2013: 5). Sumber data yang dianalisis adalah hasil dari rilis baik oleh Pemerintahan Polandia maupun Tiongkok terkait dengan kerjasama yang disepakati begitu juga dengan kebijakan Uni Eropa dan Rusia terhadap Polandia. Selain itu sumber analisis lain adalah juga berasal dari sumber pendukung yang berasal dari penelitian terdahulu maupun artikel terkait perkembangan mengenai kondisi hubungan Polandia secara bilateral dengan Tiongkok.

1.7.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini pada bab pertama penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, kerangka pemikiran hingga hipotesis penelitian yang penulis ajukan. Di bab dua menjelaskan transisi sistem di Eropa Tengah yang dipicu oleh delegitimasi Uni Eropa dan naiknya agresivitas Tiongkok di Kawasan. Lalu di bab tiga menjelaskan mengenai adanya potensi ancaman yang ditunjukkan oleh Russia pada Polandia. Terakhir, bab empat adalah kesimpulan.